



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2016**

Nama Unit	:	Kepala Bidang Pengembangan Usaha
Tugas Pokok	:	Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pengembangan usaha, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang pengembangan usaha serta membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang pengembangan usaha.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengembangan usaha.</li><li>2. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang pengembangan usaha.</li><li>3. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang pengembangan usaha.</li><li>4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha.</li></ol>

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Keamanan Produk Hewan	<b>1.1 Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu (unit)</b>	- Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/ rekomendasi teknis sistem jaminan mutu (unit)	Kabupaten /Kota se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		1.1.1 Jumlah pelaku usaha yang mengajukan/memproses/ menerapkan sistim jaminan mutu/GMP (orang)	- Jumlah pelaku usaha dari Kab/Kota yang mengajukan/ memproses/menerapkan system jaminan mutu / GMP - Sistem Jaminan Mutu/Good Manufacturing Practices (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan.	Kabupaten /Kota se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		1.1.2 Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang sudah menerapkan teknologi pengolahan (orang)	Jumlah Pelaku Usaha pengolahan hasil peternakan di Kab/Kota yang sudah menerapkan Teknologi Pengolahan.  Teknologi Pengolahan adalah suatu kegiatan mengubah bahan hasil peternakan menjadi beraneka ragam bentuk/ diversifikasi olahan dan macamnya dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai tambah	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
2.	Meningkatkan Aksesibilitas Pasar Hasil Peternakan	<b>2.1 Jumlah unit usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional (%)</b>	Jumlah unit usaha di Jawa Barat yang bisa mengakses pasar regional dan nasional	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		2.1.1 Jumlah pelaku usaha yang mampu menerapkan rantai pasok dari hulu sampai hilir bidang peternakan (orang)	- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang peternakan - Rantai pasok adalah jaringan pemasaran yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk sampai ke konsumen akhir. - Rantai Pasok dari Hulu sampai Hilir Bidang Peternakan adalah aliran produk peternakan dari hulu berupa ternak hidup menjadi daging segar sapi/unggas segar sebagai produk utama dan hasil lainnya sebagai produk sampingan yang siap untuk dijual.	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		2.1.2 Jumlah stakeholder yang menyepakati dalam penetapan angka ketersediaan dan kebutuhan ternak dan hasil ternak (stakeholder)	Jumlah stakeholder yang menyepakati dalam penetapan angka ketersediaan dan kebutuhan ternak dan hasil ternak - Stakeholder peternakan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan bagi kelangsungan usaha dan	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan

			<p>pengembangan peternakan di Jawa Barat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angka ketersediaan ternak dan hasil ternak adalah angka yang menggambarkan jumlah ternak dan hasil ternak di Provinsi Jawa Barat pada periode tertentu.</li><li>- Angka Kebutuhan Ternak dan Hasil Ternak adalah angka yang menunjukkan kebutuhan ternak dan hasil ternak di Jawa Barat dalam satu tahun. Data konsumsi hasil ternak per kapita bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS)</li></ul>		
		<b>2.2. Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP (%)</b>	Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang sudah menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP sesuai dengan manajemen pasar ternak untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peternak dan ternak.	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		<b>2.2.1. Jumlah fasilitas pemasaran peternakan kabupaten/kota dan Poktan/Gapoktan (unit)</b>	<p>Jumlah fasilitas pemasaran peternakan kabupaten/kota dan Poktan/Gapoktan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas Pemasaran untuk Poktan/ Gapoktan adalah fasilitas untuk memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil peternakan ditingkat peternak yaitu Poktan PHP (Kelompok Ternak Pemasar Hasil Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas jaringan pemasaran. Fasilitas pemasaran untuk Poktan / Gapoktan disediakan bagi poktan/ gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/ prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran.</li></ul>	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
3.	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	<b>3.1 Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya (kelompok)</b>	<p><b>Jumlah kelompok tani yang dapat meningkatkan usahanya</b></p> <p>Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota</p>	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		<b>3.1.1 Jumlah kelembagaan peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha (kelompok)</b>	<p>Jumlah kelembagaan peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha peternakan</p> <p>Kelembagaan Peternakan adalah Lembaga yang ada di dalam masyarakat atau lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk peternak yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menangani dan mengembangkan usaha agribisnis peternakan secara formal, terorganisir dan mempunyai legalitas guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan peternak, dalam bentuk kelompok peternak, asosiasi dan korporasi</p>	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan

4.	Meningkatnya usaha peternakan yang ekonomis	<b>4.1 Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing (persen)</b>	<b>Prosentase pelaku usaha yang berdaya saing</b>  Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi standar SNI/ISO, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan
		4.1.1 Jumlah pelaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha (orang	Jumlah pelaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha  Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok, Gabungan kelompok (gapok) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha	Kabupaten /Kota Se Jawa Barat	Kepala Bidang pengembangan

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN**

**Ir. R. TAUFIK GARSADI, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP.19641110 199103 1 016**